



**LAPORAN INDIVIDU
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI
BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

DISUSUN OLEH:

**SEPTA MARUS EKA PUTRA, SH.,MH.
NIP. 197109081992031005
NDH. 02**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN III
BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

**PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

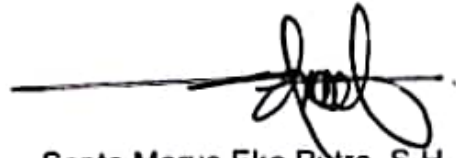
Bandung, Oktober 2023

Disetujui
Pembimbing I



Dra. Sugiatuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196307091990032006

Peserta



Septa Marus Eka Putra, S.H., M.H
NIP. 17109081992031005

Pembimbing II



Hj. Holijan, S.H., M.H
Widyaiswara Ahli Madya
NIP. 196909071996032004

**MENGESAHKAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Prof. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 197507071997031003

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
A. PROFIL ORGANISASI	1
B. PROFIL KINERJA PELAYANAN	3
C. ANALISA MASALAH KINERJA PELAYANAN/	
ORGANISASI	7
D. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH	10
1. Terobosan/Inovasi	10
2. Tahapan Kegiatan.....	11
3. Sumberdaya (Peta dan Pemanfaatan)	15
4. Manajemen Risiko	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan III Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Laporan Studi Lapangan dapat terlaksana atas bimbingan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya.
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya.
3. Para fasilitator Studi Lapangan.
4. Pembimbing Studi Lapangan Ibu Dra. Sugiastuti, S.S.,M.M. dan Ibu Hj.Holijah, S.H.,M.H.
5. Para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Provinsi Sumatera Selatan Angkatan III Tahun 2023 yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan Studi Lapangan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, namun demikian kami berharap laporan ini dapat menjadi pembelajaran baik untuk dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Semoga bermanfaat.

Bandung, Oktober 2023

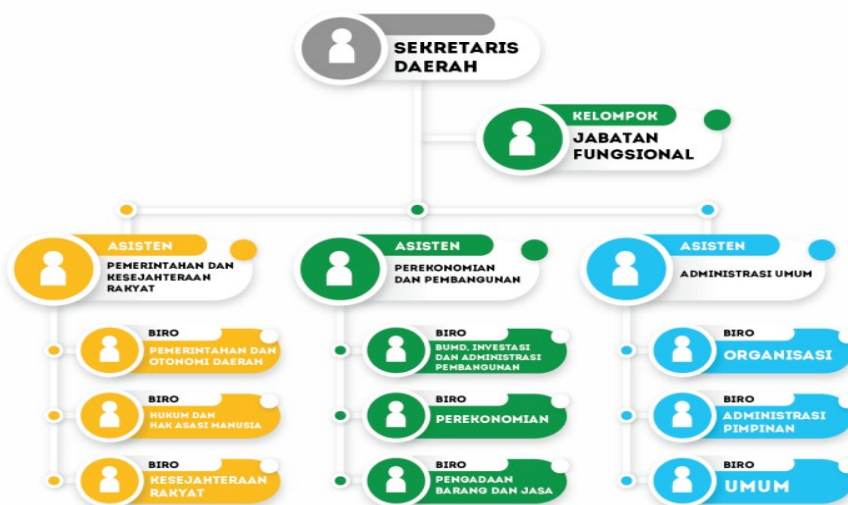
Penulis

A. Profil Organisasi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok Sekretariat Daerah adalah merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengendalikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Selanjutnya Ayat (2) menguraikan fungsi Sekretariat Daerah adalah pada:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi;
2. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
3. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
4. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Daerah Provinsi;
5. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
6. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RENSTRA SETDA PEMPROV JAWA BARAT

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Sekretariat Daerah di dukung oleh 3 (tiga) unit eselon Ib yang mempunya tugas merumuskan kebijakan umum, koordinasi, dan supervise perangkat daerah di sesuai dengan ruang lingkup asisten, serta 9 (Sembilan) Unit Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, meliputi perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang perekonomian, meliputi sumber daya alam, ketahanan pangan dan pertanian, serta sarana perekonomian yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi daerah dan administrasi pembangunan, meliputi BUMD Lembaga keuangan, Badan Layanan

Umum Daerah, BUMD non lembaga keuangan, investasi daerah dan administrasi pembangunan;

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan;
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi;
8. Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administratif dalam bidang administrasi pimpinan, meliputi rumah tangga, materi dan komunikasi pimpinan serta keprotokolan;
9. Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dalam hal penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan asset dalam hal pemberian pelayanan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja, serta bidang tata usaha dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan pada lingkup Sekretariat Daerah.

B. Profil Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Peran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi adalah pada perumusan kebijakan umum daerah provinsi. Peran ini, memberikan kontribusi optimal pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kontribusi peran ini tergambarkan dalam pencapaian kinerja setda yang

sangat baik melalui pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dengan proyeksi tahun 2022 terealisasi pada predikat A.

Gambar 2.1.
Core Business Sekretariat Daerah



Sumber: RENSTRA PEMPROV JAWA BARAT

Secara umum, sasaran strategis mengarah pada dua klasifikasi yaitu pada pemastian kualitas kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Pada pemastian kualitas kebijakan, sasaran strategis ditetapkan dengan kalimat ‘meningkatnya kualitas kebijakan’. Sasaran ini difokuskan pada kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sehingga tolok ukur pencapaiannya diamanatkan kepada tiga biro yaitu Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, serta Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan. Secara teknis, kinerja ketiga biro tersebut adalah untuk memastikan bahwa proses perumusan kebijakan dari mulai perencanaan hingga evaluasi dipenuhi dan dipatuhi. Adapun pengukuran didasari pada perhitungan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

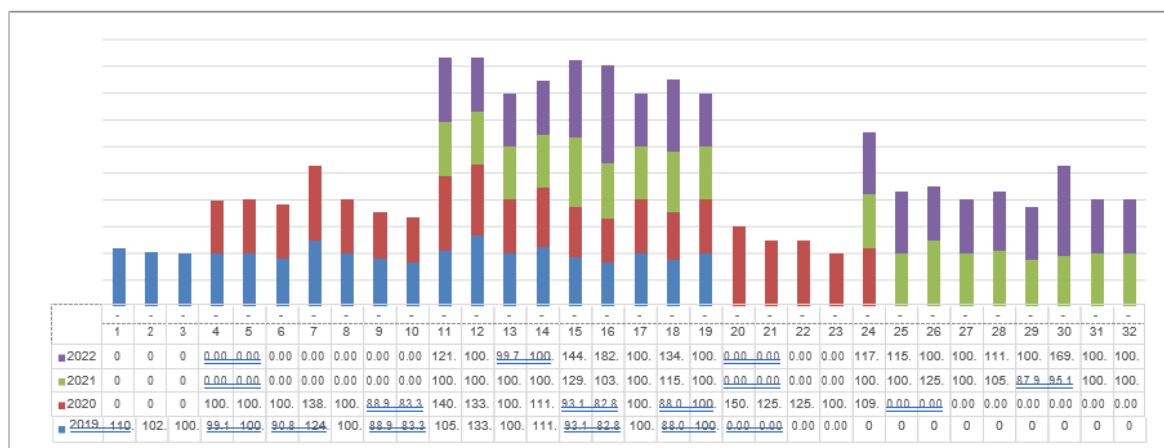
Kemudian, pada pemastian implementasi kebijakan dilakukan dengan menetapkan empat sasaran, antara lain:

1. meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang ditetapkan sebagai dukungan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu 'terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel' dan merupakan penerapan dari kebijakan terkait reformasi birokrasi. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada lima biro yaitu Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Organisasi. Pengukuran yang menjadi tolok ukur pencapaiannya didasarkan pada perhitungan evaluasi penerapan reformasi birokrasi di delapan area perubahan sebagaimana dilakukan oleh KemenPAN & RB;
2. meningkatnya kualitas pembinaan, pemahaman pengamalan keagamaan yang ditetapkan sebagai dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu 'meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi'. Kinerja ini merupakan implementasi dari kebijakan terkait kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama. Adapun pencapaiannya, diamanatkan hanya kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yang mengampu fungsi pembinaan bidang keagamaan;
3. diusulkannya calon daerah otonomi baru yang merupakan kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat yaitu terbentuknya daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan'. Kinerja ini merupakan implementasi kebijakan pimpinan dalam pemekaran wilayah untuk menjamin terjadinya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur syarat pemekaran wilayah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000;
4. meningkatnya kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kinerja pendukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan

- ‘terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif’. Ini pun merupakan implementasi terhadap kebijakan pimpinan yang menekankan urgensi kolaborasi untuk pembangunan yang efektif dan efisien. Pencapaian sasaran ini diamanatkan hanya kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan pengukuran didasarkan kepada kebijakan yang mengatur tentang efektifitas kerjasama daerah;
- meningkatnya kualitas layanan sekretariat daerah yang merupakan implementasi dari kebijakan tugas pokok dan fungsi untuk memastikan kinerja setda berjalan secara optimal. Kinerja ini merupakan kinerja pendukung bagi pencapaian sasaran setda yang lainnya. Adapun pencapaiannya diamanatkan kepada Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum dengan pengukuran melalui survey kepuasan.

Secara rata-rata kinerja SETDA PEMPROV JABAR dalam empat tahun terakhir menunjukkan kondisi yang memuaskan dengan capaian sebesar 103,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Diagram 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Setda Prov Jabar Tahun 2019-2022



Sumber: RENSTRA PEMPROV JAWA BARAT

Pada Biro Organisasi, capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Capaian Aspek/Indikator Kinerja Biro Organisasi SETDA PEMPROV JABAR

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Penguatan Organisasi	Nilai	2.08	2.08	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	
2	Nilai Penataan Organisasi	Nilai	2.22	2.22	N/A	N/A	N/A	1.85	1.85	N/A	N/A	
3	Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4.1	4.1	4.06	4.18	4.3	3.82	3.82	5.26	6.23*	
4	Nilai Penataan Tata Laksana	Nilai	3.62	3.62	3.2	3.3	3.4	3	3	3.31	6.2*	
5	Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A*	
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Sumber: RENSTRA PEMPROV JAWA BARAT

Bisa dilihat dari tabel 1.1 bahwa kinerja Biro Organisasi Setda Pemprov Jawa Barat setiap tahun terus meningkat. Tahun 2022 biro Organisasi Setda Pemprov Jabar dapat mencapai semua target yang ditetapkan.

C. Analisa Masalah Kinerja Pelayanan Organisasi

Di dalam pelaksanaan fungsi 'penerapan tata kelola pemerintahan yang baik' beberapa permasalahan yang diperoleh berkaitan dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap enam area perubahan yang berada dalam kewenangan fungsi setda. Enam area tersebut adalah manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, deregulasi kebijakan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1. Area manajemen perubahan

Pada penerapan manajemen perubahan, budaya kinerja yang baik belum merata terjadi pada seluruh perangkat daerah. Hal ini diperlihatkan dari hasil evaluasi penerapan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Tahun 2021 yang pada area ini diperoleh nilai 4,07 poin dari nilai maksimal 5,00 poin. Salah satu pendorongnya adalah penerapan core value berAKHLAK baru mencapai 73,12 poin dari total nilai 100 poin dimana baru enam dari 37 perangkat daerah (16%) yang memperoleh kategori baik.

Disamping itu, perubahan birokrasi pun belum terinternalisasi secara menyeluruh. Hal ini diperlihatkan dari baru 81% dari total perangkat daerah termasuk ke dalam unit kerja dengan reformasi birokrasi dalam rentang kategori BB dan B. Hal ini mengandung arti bahwa reformasi birokrasi diterapkan namun belum memuaskan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang telah dilakukan setda dalam menginternalisasi perubahan budaya pada perangkat daerah belum cukup.

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Pada area penataan dan penguatan organisasi, penerapan organisasi berbasis kinerja dinilai belum maksimal. Hal ini ditandai oleh hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai perolehan 5,09 poin dari nilai maksimal 7,50 poin. Hasil ini didorong oleh bahwa penentuan struktur organisasi dinilai belum didasarkan pada arsitektur kinerja atau proses bisnis. Kondisi eksisting bahwa arsitektur kinerja telah dapat memperlihatkan adanya ketidaktepatan fungsi pada suatu struktur unit kerja namun tindak lanjut dari penemuan tersebut belum diaplikasikan.

3. Area Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana berkaitan dengan mekanisme kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, penerapannya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai belum maksimal ditandai dengan hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 yang memberikan nilai 4,34 dari nilai total 6,25 poin. Penilaian ini didorong oleh belum jelasnya relasi konseptual antara proses bisnis dan pengukuran kinerja. Lalu, keterhubungan antara proses bisnis dan prosedur standar operasional (SOP) juga belum dirumuskan.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dinilai 'memuaskan' yang diperlihatkan dari hasil evaluasi KemenPANRB Tahun 2021 dengan nilai 85,01 poin atau kategori A. Perolehan ini sudah baik namun belum sesuai dengan harapan. Beberapa hal yang masih memerlukan optimalisasi adalah tingkat akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain daripada itu, kualitas pelaporan kinerja yang belum informatif belum dapat memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai target kinerja selanjutnya.

5. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan publik dinilai memiliki kualitas tertinggi dengan kategori A. Sehingga pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada dalam zona hijau. Namun hasil evaluasi KemenPANRB memperlihatkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum ditingkatkan secara maksimal. Dari data penilaian Tahun 2021, diperoleh nilai 5,08 poin dari total maksimal sebesar 6,25 poin. Adapun beberapa aspek yang dinilai memerlukan peningkatan antara lain adalah pengelolaan pengaduan dan konsultasi serta inovasi pelayanan publik.

D. Strategi Penyelesaian Masalah

1. Terobosan/Inovasi

a. Terobosan/Inovasi Lokus

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholders yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan potensi diri kompetensi untuk adopsi aksi perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya.

Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan Pembangunan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Biro organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terkenal dengan slogan **"Innovation and Growth For A Fundamental Shift"**. Inovasi unggulan pada Biro Setda Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah:

- a. Aplikasi Surabi (Sistem Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan system informasi untuk mempermudah pelaksanaan evaluasi implementasi RB yang dilengkapi dengan petunjuk teknis.
- b. Portal Jabarprov. Portal ini menyediakan informasi resmi, akses ke berbagai layanan publik dan tempat menyampaikan aspirasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- c. Jabar super.apps, aplikasi yang membuat pelayanan publik menjadi lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan.

b. Adopsi Bagi Instansi Peserta

Setelah melakukan analisis terhadap kunjungan lokus mitra studi lapangan, didapatkan poin penting yang dapat diadopsi dalam rangka rancangan aksi perubahan. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengembangkan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang baik sehingga, dan apabila dikaitkan dengan area perubahan penulis ditemukan inovasi bahwa gagasan aksi perubahan penulis juga dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan lokasi wisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, akan dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di lokasi wisata ziarah dalam wilayah Kecamatan Ilir Timur Dua.

Adapun judul Rancangan Aksi Perubahan yang akan dilakukan adalah “OPTIMALISASI POTENSI WISATA ZIARAH MELALUI KELOMPOK MASYARAKAT SADAR WISATA (POKDARWIS) KECAMATAN ILIR TIMUR DUA”.

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan adalah Rencana kerja secara rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang umumnya disusun dari Rencana Strategis. Tahapan Kegiatan dalam proses pelaksanaan Aksi Perubahan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Pentahapan/Strategi

No.	Uraian Kegiatan dan Tahapan Kegiatan	Waktu	Output
A.	JANGKA PENDEK (2 BULAN)		
1	Melapor kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Mentor): - Menjelaskan teknis pelaksanaan aksi perubahan - Meminta dukungan - Mendapatkan arahan	Minggu ke-4 Bulan Oktober 2023	- Surat dukungan dari mentor - Foto
2	Membentuk Tim Teknis/Tim Efektif untuk menggalang inisiatif masyarakat: - Menyiapkan draft SK Tim Efektif - Meminta saran pimpinan - Menandatangani SK Tim Efektif.	Minggu ke-4 Bulan Oktober 2023	- Surat Keputusan Tim Efektif - Tanda terima Surat Keputusan
3	Melaksanakan rapat dengan tim efektif untuk penyamaan persepsi di lingkungan internal Kecamatan Ilir Timur Dua: - Membuat undangan kepada tim efektif - Membuat daftar hadir	Minggu ke-1 Bulan November 2023	- Undangan rapat - Daftar Hadir - Daftar uraian tugas tim efektif - Notulen rapat - Foto

	c. Menjelaskan tugas tim efektif d. Menyusun laporan hasil rapat		
4	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat: a. Membuat surat undangan dan daftar hadir b. Menyiapkan materi/bahan rapat koordinasi c. Melaksanakan rapat dan meminta dukungan d. Membuat laporan hasil rapat koordinasi	Minggu ke-1 Bulan November 2023	1. Undangan rapat 2. Daftar Hadir 3. Daftar uraian tugas tim efektif 4. Notulen rapat 5. Foto
5	Mengumpulkan bahan dalam rangka pembentukan Pokdarwis: a. Membuat surat permintaan bahan pembentukan POKDARWIS dari Kelurahan-Kelurahan di wilayah Kecamatan Ilir Timur Dua b. Menyampaikan surat kepada Lurah	Minggu ke-2 Bulan November 2023	1. Surat Permintaan 2. Tanda terima surat 3. Daftar bahan pelebagaan berdasarkan indicator 4. Foto

	c. Mengumpulkan bahan dari Kelurahan sesuai kebutuhan		
6	Membentuk dan mengesahkan POKDARWIS: - Membuat draft Surat Keputusan pembentukan Pokdarwis - Meminta saran mentor/pimpinan - Menandatangani SK Pembentukan POKDARWIS	Minggu ke-4 Bulan November 2023	- Surat Keputusan Tim Efektif - Tanda terima Surat Keputusan
7	Melaksanakan Pengukuhan Pengurus POKDARWIS: - Membuat surat undangan dan blanko daftar hadir - Menyiapkan acara pengukuhan - Melaksanakan acara pengukuhan - Membuat laporan hasil pengukuhan Pengurus Pokdarwis	Minggu ke-1 Bulan Desember 2023	- Undangan rapat - Daftar Hadir - Foto
8	Membuat laporan hasil pelaksanaan aksi perubahan untuk jangka pendek. Mengumpulkan dokumentasi dan berkas	Minggu Ke 2 Bulan Desember 2023	1. Laporan Aksi Perubahan

	pelaksanaan aksi perubahan b. Menyusun Laporan Aksi Perubahan		
B.	JANGKA MENENGAH (6 BULAN)		
	Terjalinnya kerjasama dan kolaborasi antara Kecamatan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang		
C.	JANGKA PANJANG (2 TAHUN)		
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat menjual produknya di lokasi wisata religi		

3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatannya)

Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan aksi perubahan ini terbagi menjadi Stakeholder internal dan eksternal dengan identifikasi berdasarkan kepentingan dan dukungan sebagai berikut:

- a. Promoters yaitu pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang besar untuk membuat upaya proper berhasil atau menggelincirkannya;
- b. Defenders yaitu pihak yang memiliki kepentingan dan menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempegaruhi upaya Proper;

- c. Latents yaitu pihak yang tidak memiliki kepentingan khusus, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi upaya proper jika mereka tertarik;
- d. Apathetics yaitu pihak yang Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya proper

Tabel 4.2.
Identifikasi Stakeholder

STAKEHOLDER INTERNAL	STAKEHOLDER EKSTERNAL
- Camat Ilir Timur Dua Palembang - Sekretaris Kecamatan - Lurah - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan - Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan - Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan - Staff/Admin Kecamatan	- Walikota Palembang - Dinas Pariwisata Kota Palembang - Dinas Kebudayaan Kota Palembang - Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang - Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah - Pengusaha UMKM - Masyarakat - Tokoh Agama setempat - Tokoh Budaya setempat

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pengaruh dan kepentingan dari stakeholders agar dapat ditentukan posisi mereka pada peta stakeholder sebagai berikut:

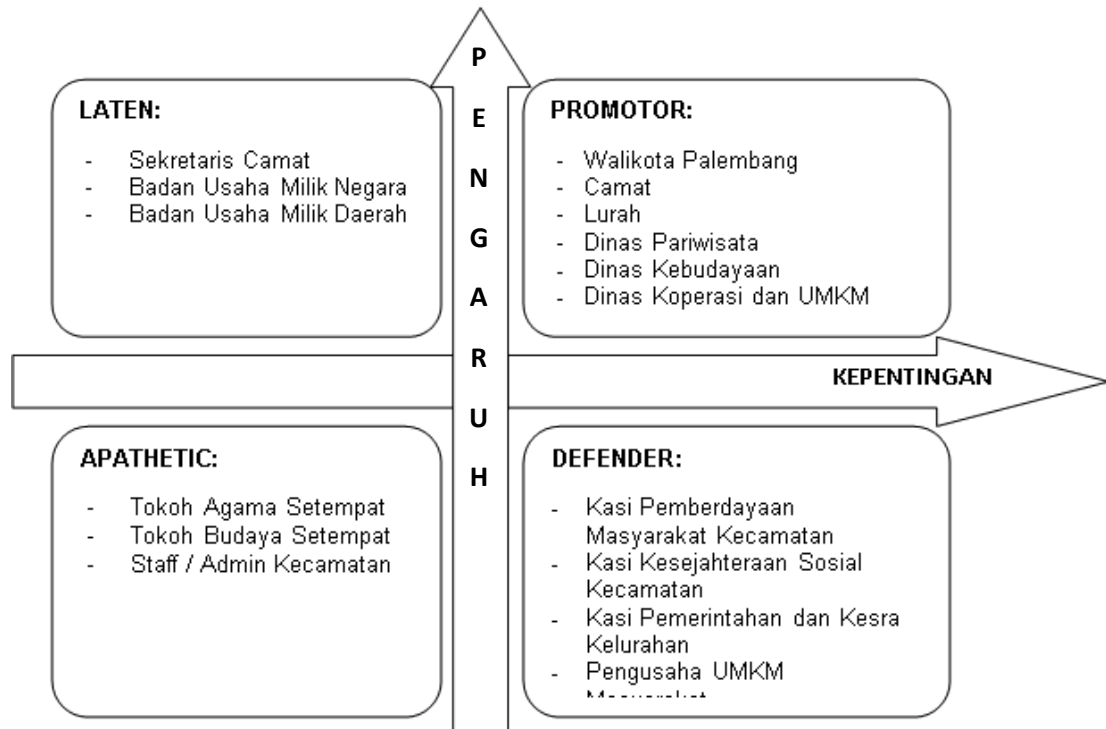
Tabel 4.3.

Analisis Terhadap Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders

No.	Stakeholders	Pengaruh	Kepentingan	Kategori
1	Camat	+	+	Promotor
2	Sekretaris Camat	+	-	Laten
3	Lurah	+	+	Promotor
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	-	+	Defender
5	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	-	+	Defender
6	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan	-	+	Defender
7	Staff/Admin Kecamatan	-	-	Apathetic
8	Walikota Palembang	+	+	Promotor
9	Dinas Pariwisata Kota Palembang	+	+	Promotor
10	Dinas Kebudayaan Kota Palembang	+	+	Promotor
11	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang	+	+	Promotor
12	Badan Usaha Milik Negara	+	-	Laten
13	Badan Usaha Milik Daerah	+	-	Laten
14	Pengusaha UMKM	-	+	Defender
15	Masyarakat	-	+	Defender
16	Tokoh Agama setempat	-	-	Apathetic
17	Tokoh Budaya setempat	-	-	Apathetic

Setelah mengukur tingkat kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) stakeholder di atas, maka dilakukan pemetaan stakeholder melalui analisa quadran di bawah ini:

Gambar 4.1.
Peta Stakeholder dengan Analisa Quadran



Peran masing-masing stakeholder adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Peranan Stakeholder

No.	Stakeholders	Peranan
INTERNAL		
1	Camat	Menggagas perubahan serta memberikan persetujuan, arahan dan dukungan.
2	Sekretaris Camat	Mendukung pelaksanaan administrasi untuk pelaksanaan perubahan.
3	Lurah	Menggalang inisiatif warga
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Membantu pelaksanaan aksi perubahan
5	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Membantu pelaksanaan aksi perubahan

6	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan	Membantu pelaksanaan aksi perubahan
7	Staff/Admin Kecamatan	Membantu pelaksanaan aksi perubahan
EKSTERNAL		
8	Walikota Palembang	Memberikan dukungan dan persetujuan
9	Dinas Pariwisata Kota Palembang	Memberikan dukungan berupa pembinaan
10	Dinas Kebudayaan Kota Palembang	Memberikan dukungan berupa pembinaan
11	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang	Memberikan dukungan berupa pembinaan
12	Badan Usaha Milik Negara	Memberikan dukungan moril dan materil
13	Badan Usaha Milik Daerah	Memberikan dukungan moril dan materil
14	Pengusaha UMKM	Memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif
15	Masyarakat	Memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif
16	Tokoh Agama setempat	Berpartisipasi aktif
17	Tokoh Budaya setempat	Berpartisipasi aktif

4. Manajemen Risiko

Pelaksanaan program kerja Rancangan Aksi Perubahan untuk pencapaian target, dibedakan dalam tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri akan ditemukan beberapa kendala. Penulis mencoba menginventarisir resiko dan solusi yang harus dihadapi seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Manajemen Resiko

No	Kendala	Risiko	Solusi
A. Kendala Internal			
	Tim Efektif	Tahapan Kegiatan Rancangan Aksi Perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal	- Monitoring perkembangan kegiatan dan capaian yang dihasilkan. - Penjadwalan ulang tahapan yang tidak terlaksana
		Kurangnya pemahaman tim efektif atas pekerjaan yang diberikan	- Melaksanakan learning organization kepada anggota dan manfaat yang dimilikinya
		Konflik antar anggota tim	Membagi peran masing- masing tim. Melakukan komunikasi efektif dalam tim
B. Kendala Eksternal			
		Kurangnya lengkapnya informasi dan data yang disediakan dari stakeholder.	- Kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait
		Gangguan pemrosesan sistem Informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan	- Akses ke dokumen sumber dibatasi - Akses ke terminal entri data dibatasi - Pengendalian kelengkapan data, informasi - Pengendalian akurasi

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PESERTA PKA TIBA DI GEDUNG SATE



PENERIMAAN PESERTA PKA DI RUANG PAPANDAYAN



AUDIENSI PESERTA PKA DI BIRO ORGANISASI



PENYERAHAN CINDERAMATA



DOKUMENTASI RAMAH TAMAH



PENYUSUNAN LAPORAN STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI





Laporan Studi Lapangan Kinerja Organisasi

**Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Barat**

DISUSUN OLEH :

1. KETUA : Dr. DIAN ARYOGO SUTOYO, M. Psi
2. WAKIL KETUA : SEPTA MARUS EKA PUTRA, S.H, M.H
3. SEKRETARIS : LYDIA GUSMALITA, S.STPM.Ec. Dev
4. ANGGOTA :
 1. ARYA DEWANTARAS.E,M.Si
 2. IMAM ILHAM, S.H, M.H
 3. ALEXANDER, S.IP.M.Si
 4. JUFRIANSYAH, S.STPM.Si
 5. DERRY ARIADI, S.H, M.H
 6. FETRI ASWANTI, S.TM.Si, M.
 7. ARDHILES P. RAJA SIAHAAN, S.T
 8. HENDRI WARDISON, S.PM.Si
 9. PUTRI DAMAYANTI,S.Psi, M.M
 10. SRI ULFATI, S.H
 11. BRAM ABRAHAM, SE
 12. NUR AINUN TANJUNG, S.Ag



Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

Tugas

menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pengkoordinasian, supervisi, dan pelayanan administrative dalam bidang organisasi, meliputi kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja serta tatalaksana yang menjadi kewenangan Provinsi

Fungsi

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum, koordinasi administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian dan pelayanan administratif dalam bidang organisasi;
- b. penyelenggaraan administrasi Biro Organisasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Biro Organisasi; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Empat Sasaran Implementasi Kebijakan

01

Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Smart, Bersih, Dan Akuntabel

02

Meningkatnya Keimanan Dan Kerukunan Umat Beragama Dalam Kerangka Demokrasi '

03

Terbentuknya Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan

04

Terwujudnya Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Yang Sinergis Dan Integratif '

No	Aspek/Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Provinsi Jawa Barat											
6	Nilai Manajemen Perubahan	Nilai	3.69	3.69	3.45	3.55	3.65	3.25	3.25	3.97	4.92*	
7	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai	N/A	N/A	3.94	4.06	4.18	N/A	N/A	3.75	7.09*	

Key Success Factors

01

Komitmen tinggi
dari seluruh
Stakeholder

03

Pembangunan Jejaring
Kerja dan Kolaborasi
Pemangku Kepentingan

02

Kepemimpinan
Transformasional
dan Inovatif

04

Pemanfaatan Teknologi
Digital



Lessons Learned Hasil STULA

01

Planning and budgeting

Melalui pelaksanaan
“Program Penataan
Organisasi”

02

Pemanfaatan Teknologi Informasi

- ✓ Sidebar Mobile Apps (tatakelola persuratan)
- ✓ TRK (Aplikasi E- Kinerja)
- ✓ KMOB (aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ SURABI (Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi)
- ✓ Portal JABARPROV
- ✓ JAPATI (Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

Lessons Learned Hasil STULA (lanjutan)

03

Sistem Kerja Aparatur

- ✓ Tim Internal Bidang
- ✓ Tim Agile antar Bidang
- ✓ Tim Agile Lintas Perangkat Daerah
- ✓ Tim Agile Lintas Instansi

04

Manajemen Kinerja

- ✓ Manajemen Proses Bisnis
- ✓ Membangun Arsitektur Kinerja
- ✓ Menyusun Cascading kinerja
- ✓ Menyusun Crosscutting kinerja lintas

05

Manajemen Resiko

- Membuat komite manajemen resiko :
- ✓ Komite Eksekutif
 - ✓ Komite Pelaksana
 - ✓ Biro/bagian



Lesson Learned Hasil lanjutan

06

Peran Kepemimpinan

- ✓ Mendorong Kreatifitas dan budaya inovasi
- ✓ Menciptakan lingkungan kerja yang dinamis
- ✓ Mekanisme kerja dinamis
- ✓ Mengembangkan jaringan dan kolaborasi

07

Inovasi Pelayanan

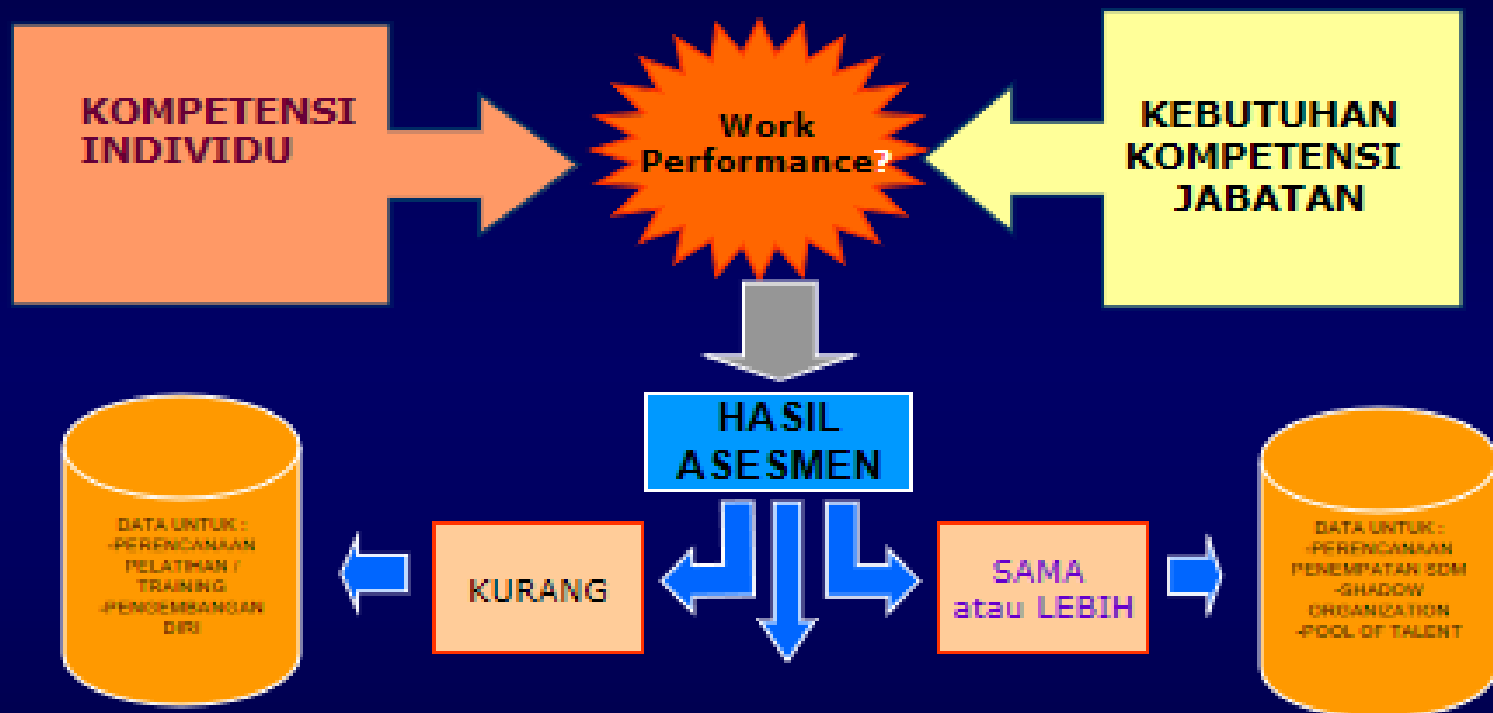
- ✓ Sidebar Mobile Apps
- ✓ Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK)
- ✓ KMOB (Aplikasi Kehadiran Mobile)
- ✓ Aplikasi Surabi (Sistem pengukuran Indeks Reformasi Birokasi Terintegrasi)
- ✓ Portal Jabar Prov
- ✓ JAPATI (Jawa Barat Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Terintegrasi)

08

Kompetensi dan Pemberdayaan SDM

- ✓ Penyederhanaan Birokrasi
- ✓ Penyederhaan Struktur Organisasi dan tata kerja
- ✓ Pendefinisian Peran Perangkat Daerah
- ✓ Manajemen Talenta dengan melakukan inovasi SIM Jawara

IMPLEMENTASI ASESMEN POTENSI & KOMPETENSI SDM

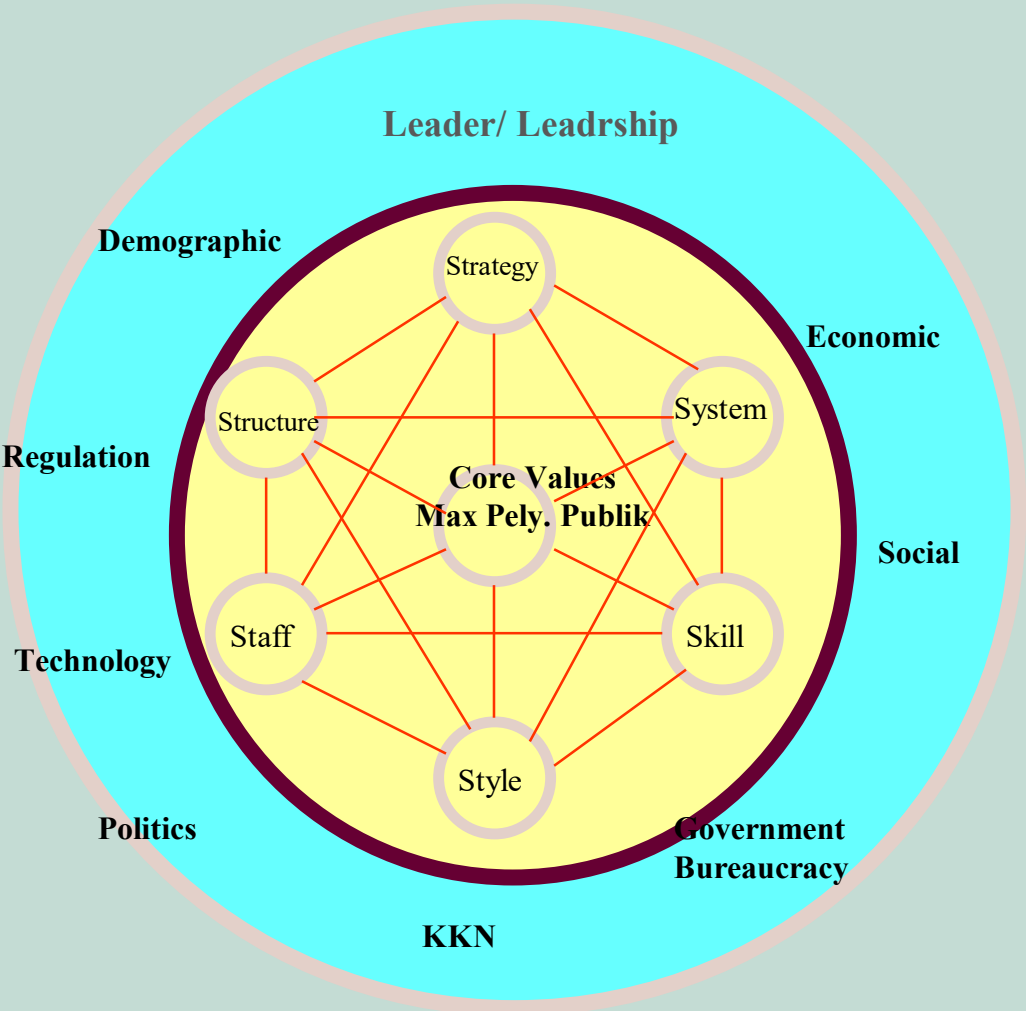


MODEL MANAJEMEN TALENTA



**DISRUPTION
ERA**

Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous



FINAL LEASON LEARN COMPARATIF STUDY ORGANISASI (JAWA BARAT & SUMATERA SELATAN)

Personal

- ✓ Resiliensi
- ✓ Responsif dan terbuka terhadap perubahan
- ✓ Inovatif
- ✓ Selalu berusaha mengembangkan diri
- ✓ Memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi

Pengelola SDM

- ✓ Merekrut & mengidentifikasi potensi Talent
- ✓ Membangun keterampilan pegawai
- ✓ Menyusun program pengembangan pegawai
- ✓ Memberikan informasi karier yang jelas

Pimpinan

- ✓ Memperkuat komunikasi dengan pegawai, menjadi role model
- ✓ Memberi spirit
- ✓ Memberikan arahan yang jelas
- ✓ Memberi apresiasi kepada pegawai

Organisasi

- ✓ Menarik Talent terbaik
- ✓ Adanya pilihan kerja fleksibel
- ✓ Menyediakan lingkungan kerja yang adil, kompetitif, dan transparan

ORGANIZASIONAL BEHAVIOR



EVALUATION

INPUT:

Raw Input, Instrumental input

Benefit, Impact:

1. Bagi Masyarakat
2. Bagi Daerah: Capaian RB Tematik, IKD

Output:

Lulusan, Capaian Tujuan Pembelajaran

Outcome:

1. Kemanfaatan bagi jabatan (talent pool/management)
2. Kemanfaatan bagi instansi (Kinerja Organisasi, IKU)



Perubahan sistem organisasi dan tata kerja di Pemprov Jawa Barat berhasil dengan baik karena mendapatkan dukungan penuh peran kepemimpinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

“

**DIGITALISASI
ADALAH TOOLS,
BUKAN TUJUAN.**

**KEPUASAAN PUBLIK
ADALAH TUJUAN
SEBENARNYA.**

”

